

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan melalui pergeseran struktur kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier (Tri Widodo, 2006).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang umum digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan erat dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan tersebut kemudian diharapkan dapat memberikan *trickle down effect* karena itu, sudah sewajarnya peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional digunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil, sedangkan untuk tingkat daerah digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil (M. Rizal, 2013:2).

Selain itu, pertumbuhan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sertai dengan perubahan struktur ekonomi dan distribusi pendapatan. Bertitik tolak dari definisi ini maka pembangunan pada hakekatnya

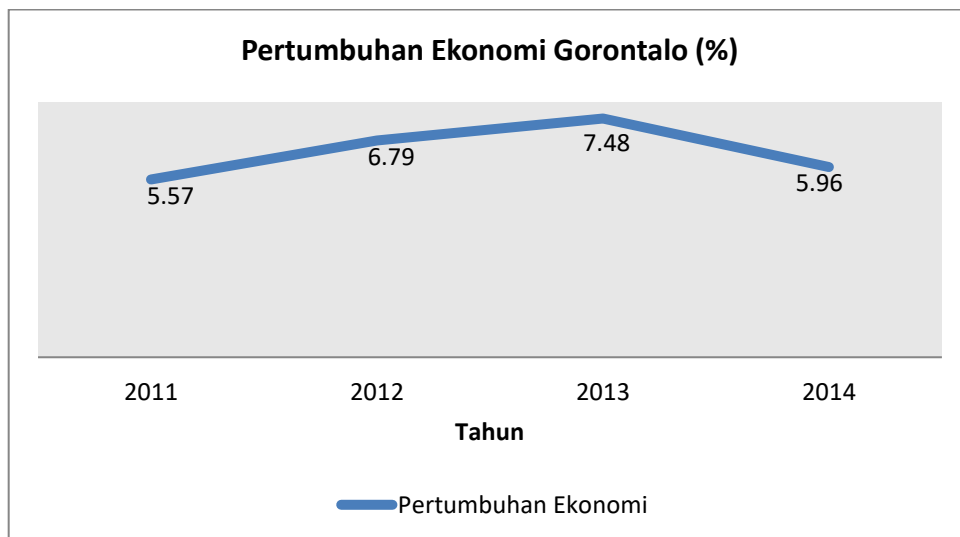
adalah usaha yang terus menerus untuk mencapai masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Perwujudan sasaran pembangunan antar lain dapat dibuktikan dengan adanya penurunan pemerataan pendapatan serta pemerataan pembangunan sampai ke pelosok desa. (E. Wayne Nafziger dalam Fachrudin, 2014)

Provinsi Gorontalo terdiri atas 6 kabupaten/kota memiliki latar belakang perbedaan antar wilayah. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber alam yang penyebarannya berbeda di setiap wilayah. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki seharusnya dapat menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan yang dimiliki tersebut di harapkan memberikan dampak yang menyebar efek menetes ke bawah (*Trickle Down Effect*).

Di Provinsi Gorontalo, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah kenaikan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB). Secara konsesional pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berlangsung secara terus menerus harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan mampu memecahkan masalah-masalah dalam pembangunan seperti Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketimpangan Pembangunan.

Provinsi Gorontalo terdiri atas 5 kabupaten dan 1 kota memiliki latar belakang perbedaan antar wilayah. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda di

setiap wilayah. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki seharusnya dapat menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan yang dimiliki tersebut diharapkan memberikan dampak menyebar (*trickle down effect*).



Sumber : Simreg/Data diolah

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada tahun 2011-2013 mengalami pertumbuhan yang positif, namun di tahun 2014 Provinsi Gorontalo mengalami penurunan drastis hingga 5.96 persen. Meskipun demikian laju pertumbuhan ekonomi di provinsi Gorontalo relatif stabil dikarenakan pencapaian hasil-hasil pembangunan sangat dirasakan masyarakat merupakan *agregat*

pembangunan dari 5 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Gorontalo yang tidak terlepas dari usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Salah satu faktor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo adalah Anggaran daerah. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan dasar dalam pedoman Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah sering disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kota dan kabupaten. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008).

Menurut Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian APBD harus mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah berisi informasi mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan. APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaran pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran prestasi kerja (Yuwono, 2008:85).

Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan dan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. Undang-Undang ini menegaskan

bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan menstransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari DAU, DAK, dan bagian daerah dari hasil pajak pusat. Di samping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. PAD, DAU, dan DAK merupakan bagian dari sumber keuangan pemerintah daerah.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi peningkatan PAD selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Maryati dan Endrawati, 2010).

Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan publik. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Oleh karena itu Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum

(DAU), yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil, bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Karena tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Sidik (2000) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Brata (2004) menyatakan bahwa terdapat komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yaitu PAD. Jika peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka terdapat kemungkinan DAU dan DAK juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena nilai DAU dan DAK pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi PAD.

Peran pemerintah daerah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terlepas dari pengaruh gejolak ekonomi dan politik yang masih terjadi beberapa tahun terakhir ini. Pemerintah menjadi motor utama dalam menggerakkan perekonomian agar dapat kembali keposisi sebelum krisis.

Kebutuhan masyarakat yang meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembangan pendapatan asli daerah. Komponen PAD tersebut secara penuh dapat digunakan oleh daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, di samping memperlihatkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini semakin leluasa dilakukan oleh daerah kabupaten/kota setelah berlakunya otonomi daerah. Sumber penerimaan lainnya yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah Provinsi, serta lain-lain pendapatan yang sah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam pertanyaan sebagai berikut :

Seberapa Besar Pegaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Gorontalo?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk Mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Gorontalo.

1.4 Manfaat Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis

Untuk memperkaya Khasanah pustaka dan hasil-hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang menelaah tentang kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti yang tertarik dengan persoalan pertumbuhan ekonomi dan potensi daerah, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah ini.